

# NABI BARU VERSUS NEGARA

Oleh: Zuly Qodir\*

## Abstract

This paper elaborate phenomenon the new Prophet in Indonesia. The New prophet on community left (separated/heretic) by Majelis Ulama Indonesia (MUI) because community crowded and heretic in religious mainstream (Islam). Why this growth? The ommunities where heretic Abrahamic Religions, but in Abrahamic Tradidition late growth. What simultan within social ills, for examples state failure management plralism SARA in Indonesia, or conection within religious mission (Dakwah) or this contemporary phenomena.

This paper introduce state failure on dakwah/mission in Islam, pluralism management, and disruction national politics and economic growth. In this paper all so, describe mass dectrutive on sect (heretece) community by MUI. This paper can by religious sociological perspective, thus religion seen social reality, not religion dogma and state preposition. The New Prophet diametral position with state (new prophet vis a vis state).

## مستخلص

نجد في هذه الدراسة تظاهر الأنبياء المتزيين والطائفة المنحرفة التي تتعلق بتظاهر المشاكل الاجتماعية في أندونيسيا. ومع أن هذه الظاهرة لا تعد مشكلة جديدة في الحياة الدينية الإبراهيمية. والسؤال، لماذا تترقى هذه المشكلة في المجتمع الإندونيسي؟ هل تتعلق هذه الظاهرة بفشل الحكومة الإندونيسية في مراعاة التعددية الاجتماعية؟ و تتعلق بالدعوة الإسلامية؟ أو تكون ظاهرة مؤقتة ستزول بمرور الزمان؟

فنكتشف من هذه الدراسة أن تظاهر الانبياء المتزيين يتعلق تقصيرات الحكومة في مراعاة الدعوة

---

\* Aktivist Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Email: zuly\_qodir@yahoo.com

الإسلامية، والتعددية الدينية، والأحوال الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإندونيسي. ومع ذلك، تعرض هذه الدراسة تأثيرات الفتاوى المتحفة إلى المجتمع أو الطائفة المنحرفة. ومن هذه التأثيرات تظاهر القسوة الهائلة يجللها الدين المعين. تتحقق هذه الدراسة على نظرة علم الاجتماع الديني، حيث تضع هذه المذاهب كالمظاهر الاجتماعية في النظرة الدينية. فيقع الأنبياء المتزيفون على قطريتهم موقع الحكومة.

Keywords: New Prophet, Heretice, State, MUI

## A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering dikagetkan dengan pelbagai macam munculnya komunitas keagamaan (baca: keislaman) dengan segala bentuk ritual, kitab rujukan sampai keimanan yang dikonstruksikan berbeda dengan Islam mainstream.

Hal ini tentu saja menarik untuk dicermati lebih detail mengapa komunitas keislaman tersebut muncul kepermukaan, apakah sebelumnya sudah ada, hanya tidak muncul, ataukah memang benar-benar baru dalam arti terbentuk pasca reformasi berlangsung. Hal itu kita ketahui bahwa sebelum reformasi terjadi hampir-hampir tidak pernah terdengar adanya "aliran-aliran" yang belakangan disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) padahal sebagian keberadaannya jauh sebelum reformasi berlangsung, seperti Al Qiyadah Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bahkan Gerakan Ahmadiyah Indonesia.

Hal yang jauh lebih menarik sekalipun disesatkan, ternyata komunitas ini memiliki pengikut yang agak banyak jumlahnya, Al-Qiyadah al-Islamiyah misalnya, yang difatwa sesat MUI Oktober 2007, di Yogyakarta sendiri jamaahnya mencapai 4.500 orang, dan yang agak mengagetkan adalah sebagian besar dari mereka mahasiswa dan kelas terpelajar lainnya di samping orang-orang yang secara ekonomi sudah setle.

Tesis tersebut agaknya dapat menjadi bukti jika Yogyakarta menjadi salah satu tempat untuk suburnya pelbagai aliran (komunitas) dari yang paling kanan hingga paling kiri, dari komunitas oportunist sampai radikal, demikian kata seorang pengamat gerakan sosial almarhum Mansour Fakih.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih, Jalan Lurus: Manifesto Cendekiawan Organik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist, 2004), hal. 41.

Orde Reformasi oleh sebagian orang dimaknai sebagai orde yang “serba boleh”, sehingga pelbagai komunitas yang tidak tampak dan dilarang berdiri pada rezim Orde Baru saat ini merupakan “sorganya”, demikian pula dengan partai politik. Pada saat Orde Baru hanya tiga partai politik yang oleh pengamat politik Indonesia Arbi Sanit ..... single majority (Golkar) saat Orde Reformasi berlangsung adalah “sorga” bagi elit-elit politik yang hendak mendirikan partai politik, sehingga Pemilu 1999 mencapai 48 partai politik dan Pemilu 2004 mencapai 24 partai politik ikut berkompetisi. Sesungguhnya munculnya partai politik tersebut menandai tumbuhnya partisipasi politik warga negara yang selama 32 tahun berada dibawah rezim otoriter.

Pada orde reformasi itu pula, pelbagai macam komunitas sosial bermunculan, oleh Simon Philpott dianggap sebagai “berkah” demokrasi, dan sekaligus berkah bagi tumbuhnya masyarakat madani (masyarakat warga) atau masyarakat sipil Indonesia karena pengaruh gelombang demokratisasi yang terjadi di belahan negara lain seperti Pilipina, Korea, Venezuale, Republik Ceko, bahkan negara-negara Islam seperti Iran, Malaysia dan Mesir.<sup>2</sup>

Dalam konteks semacam itulah, dalam tulisan ini hendak secara khusus membahas munculnya komunitas-komunitas yang oleh MUI di sesatkan, sebagai bagian dari khazanah pemikiran dan gerakan Islam yang perlu mendapatkan ruang secara proporsional. Dalam tulisan ini perspektif yang digunakan adalah perspektif sosiologi agama, dengan menempatkan sebuah agama dalam sudut pandang sosiologi; yakni menempatkan agama sebagai realitas sosial yang nyata adanya, bukan menempatkan agama dalam perspektif sorga dan neraka, sehingga tidak ada lagi diskusi yang bisa dikembangkan sebagai bagian dari diskursif pemikiran Islam.

Dalam tulisan ini akan meminjam Emile Durkheim dalam melihat agama sebagai sebuah fenomena sosial di tengah masyarakat, di mana agama memiliki belief system, ritual, jamaah, kitab dan pemimpin.<sup>3</sup> Emile Durkheim sebetulnya telah menulis tesisnya lebih dari 20 tahun tetapi hemat masih relevan untuk membaca fenomena yang muncul di Indonesia mutakhir.

Terkait the new religious movement dalam tulisan ini akan meminjam penulis lainnya Eileen Barker,<sup>4</sup> yang melihat penyebab munculnya gerakan-gerakan

---

<sup>2</sup> Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia: Transisi Politik Indonesia*, terj. Uzair Fauzan, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 78.

<sup>3</sup> Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, (New York: The Free Press, 1965), hal. 274.

<sup>4</sup> Eileen Barker, *New Religious Movement: A Practical Introduction*, (Portugal: HMSO Publishing, 1991), hal. 75-84.

keagamaan dalam konteks Kristen untuk komunitas Islam Indonesia. Dalam konteks Kristen dan Islam model *the new religious movement* pernah dikaji oleh cendekiawan muslim semacam Azumardy Azra, Hendro Presetyo, Franz Magnis Suseno, SJ, Th. Sumartana tatkala membahas tentang fenomena fundamentalisme agama di Indonesia, dengan fenomena maraknya kekerasan komunal berbasis agama di Indonesia pasca krisis ekonomi nasional tahun 1996.<sup>5</sup>

Khusus mengenai kekerasan komunal berbasis keagamaan pernah dikaji secara komprehensif oleh Th. Sumartana dan Ahmad Suaedy tatkala membahas kasus Kerusuhan Situbondo yang dalam kajiannya di nyatakan adanya *missing link* antara kiai pesantren Situbondo (Islam) dengan kekerasan massa yang membakar, membunuh dan merusak gereja serta fasilitas publik lainnya.<sup>6</sup> Sementara konflik sosial-komunal dikaji oleh Loekman Sostrisno dan kawan-kawan dari Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan Universitas Gadjah Mada tahun 2007. Demikian pula kerusuhan Sanggauledo dan Sambas Kalimantan Barat yang memakan banyak korban dan kerusuhan Ambon Maluku telah dikaji oleh Komnas HAM tahun 2000.<sup>7</sup>

Persoalan munculnya nabi-nabi baru di Indonesia bisa saja belum seperti yang digambarkan demikian menghebohkan dalam studi-studi terdahulu dari banyak persepektif dan para ahli. Namun demikian ada beberapa titik persoalan yang sesungguhnya memiliki kesamaan karakteristik sehingga tendensinya bisa dikatakan tidaklah berlebihan jika perspektif yang mereka pergunakan bisa kita pinjam dalam melihat nabi-nabi baru dalam tulisan ini. Sebagai gerakan sosial keagamaan yang merespon masalah-masalah internal agama, problem sosial politik dan penyakit sosial lainnya mengindikasikan adanya kesamaan.

Tetapi perlu segera diingatkan, bahwa apa yang ditulis di sini tidak berpretensi menjadi jawaban atas rumitnya problem yang menghadang di depan umat beragama, tetapi paling tidak berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran atas problem di masyarakat Indonesia.

---

<sup>5</sup> Tarmizi Taher, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), hal. 32-42.

<sup>6</sup> Th. Sumartana dan Ahmad Suaedy, *Kerusuhan Situbondo*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian, Interfidei, 1997), hal. 25-30.

<sup>7</sup> Wahyu W Basyir, dkk., *Konflik Sosial Sanggauledo*, (Jakarta: Laporan Penelitian, Komnas HAM, 1998), hal. 78-80.



## B. Penyebab Munculnya Nabi Baru

Ketika membahas munculnya fenomena kebangkitan komunitas agama-agama yang terbayang dalam benak kita adalah adanya persoalan kejiwaan, persoalan sosial, budaya dan ekonomi yang menjadi penyebab atas semua itu. Selain itu, yang juga menjadi bayangan kita adalah bahwa dalam tradisi keagamaan selalu akan muncul sang mesiah, sang penyelamat yang turunnya pada zaman-zaman akhir.

Tentu saja dugaan semacam itu tidak seluruhnya salah, sehingga sebagian bisa dibenarkan untuk membaca sebuah kebangkitan fenomena keagamaan. Gregory Baum misalnya, mensinyalir bahwa munculnya komunitas keagamaan disebabkan karena terjadinya alienasi (keterasingan) dalam komunitas keagamaan, sehingga membutuhkan semacam panduan yang baru. Orang-orang yang teralienasi membutuhkan figur yang dianggap mampu menjadi penyelamat dari kehancuran kehidupannya. Inilah yang kemudian memunculkan tradisi mesias dalam lingkungan Kristiani, bahkan munculnya protestantisme di samping teologi pembebasan karena didasarkan pada analisa konflik kelas ala Marxian.<sup>8</sup>

Sementara, Bryan Wilson menyebutkan bahwa penyebab munculnya komunitas-komunitas agama dalam kehidupan tradisi agama "resmi" tidak lain karena merespon masalah-masalah sosial dalam lingkungan masyarakat sipil terkait keburukan ekonomi, politik, keteladanan dan "mimpi" tentang sang penyelamat. Tatkala kondisi sosial demikian tidak menentu kemana arah perubahan tidak jelas kemana akan dibawa dan entah kapan dapat diatasi, kemudian muncul seseorang yang dengan berani mengemukakan janji-janji pada publik, dan memberikan ajaran kutbah yang secara rasional dianggap bisa menyelesaikan masalah bahkan menawarkan "jalan baru" maka sebagian orang akan segera terpicat untuk mengikutinya. Inilah sebetulnya yang menjadi bagian dari milenarianisme agama-agama.<sup>9</sup>

Selain persoalan-persoalan di atas, penyebab munculnya agama baru (Nabi baru), dalam tradisi agama-agama juga tidak bisa dilepaskan karena terjadinya perebutan legitimasi sebagai basis dari otoritas untuk memiliki kekuasaan melakukan penafsiran, melakukan kontrol sekaligus mempertahankan tradisi dari hal-hal yang dianggap

---

<sup>8</sup> Gregory Baum, *Religion and Alienation: A Theological Reading of Sociology*, (New York: Paulist Press, 1975), hal. 227-238.

<sup>9</sup> Bryan R. Wilson, *Magic and The Millenium: A Sociological Study of Religious Movements of Protest Among Tribal and Third World Peoples*, (New York: World People, Harper, & Row Publiser, 1973), hal. 309-314.

“salah” dan “sesat” dalam kacamata rezim agama dan rezim politik tertentu yang tengah berkembang menjadi mainstream dalam sebuah negara atau komunitas. Perebutan legitimasi untuk mempertahankan otoritas dalam hal penafsiran dan keputusan inilah yang oleh Meredith Mc. Guice sebut sebagai kompetisi mempertahankan sumber-sumber otoritas, termasuk legitimasi keagamaan, sekalipun tidak jarang menjurus pada status quo keagamaan.<sup>10</sup>

Berpijak pada penjelasan sosiologis seperti itu, maka ada sedikit catatan terkait munculnya komunitas-komunitas yang disesatkan oleh sebuah pemegang otoritas keagamaan (baca: Islam) yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa sebenarnya MUI sebagai Majelis yang merasa memiliki otoritas tunggal menafsirkan kebenaran, termasuk menafsirkan kebenaran yang dianut sebuah komunitas merupakan bagian dari komunitas yang tengah melakukan kompetisi otoritas keagamaan di Indonesia. Bagaimana seandainya MUI tidak lagi dipatuhi fatwa-fatwanya oleh masyarakat Islam, ini bisa mendelegitimasi lembaga keagamaan yang oleh sebagian orang sangat dihormati.

MUI dengan komunitas lainnya sejatinya tengah melakukan kompetisi secara aktual dan implisit, sekalipun di dalamnya merupakan kumpulan orang-orang yang oleh MUI dianggap sebagai representasi umat Islam Indonesia. Bahkan, MUI bisa saja mengklaim bahwa MUI merupakan kumpulan orang hebat, sehingga tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang gegabah dalam memutuskan atau memfatwakan suatu perkara. Tetapi, ingatlah bahwa komunitas di luar MUI juga memutuskan suatu perkara dengan jalan yang mirip MUI, yakni tidak gegabah. Ini yang sesungguhnya menjadi bagian dari problem otoritas keagamaan itu sendiri, yakni problem otoritas rasional dan otoritas afirmatif atas kekuasaan. Dalam posisi saat ini, sebagai sebuah lembaga resmi negara, MUI agaknya mengafirmasi apa yang menjadi wilayah kekuasaannya dengan membuat fatwa dan disahkan oleh negara.

Pertanyaan tentu saja bisa diajukan, mengapa MUI membuat fatwa atas sebuah komunitas tertentu yang dianggap sesat, dan tidak memfatwa komunitas lain yang sama-sama melakukan perlawanan secara ideologis atau mendukung kebijakan MUI? Bukankah ini sebenarnya sebuah permainan kekuasaan dan perebutan otoritas legitimasi yang sangat kentara? Dengan pertanyaan lain bisa dikemukakan, siapakah yang menentukan kriteria bahwa sebuah kelompok itu sesat, sementara yang lain lurus, sehingga bisa difatwa sesat atau benar oleh MUI, bukankah MUI adalah kumpulan orang-orang bukan kumpulan para malaikat atau kumpulan para Nabi yang merepresentasikan Tuhan?

---

<sup>10</sup> Meredith B McGuice, *Religion: The Social Context*, (California: Warsworth Publishing Company, 1981), hal. 183-185.

Dalam memberikan penjelasan tentang problem otoritas keagamaan, Khaled Abou el Fadl, seorang ahli hukum Islam dari University of California Los Angeles (UCLA) menyebut bahwa otoritas keagamaan merupakan suatu hal yang harusnya dimiliki oleh para ahli dalam bidang tertentu, seperti bidang hukum Islam, bidang ekonomi, bidang politik sampai budang budaya. Namun, otoritas keagamaan seringkali mengarah pada munculnya otoritarianisme keagamaan. Hal ini disebabkan karena para pemegang otoritas keagamaan berubah bukan sebagai ahli, tetapi sebagai pemberi legitimasi atas sebuah kekuasaan politik tertentu yang lazim disebut dengan mempertahankan status quo, dimana elit agama kemudian berada dibelakangnya. Dari sana otoritas keagamaan menjadi hilang dan tidak jelas siapa sebenarnya yang memiliki dan mampu mempertahankan.<sup>11</sup>

Mendasarkan pada penjelasan Abou el-Fadl, disebabkan ketidakjelasan sebenarnya siapa pemilik otoritas keagamaan, tatkala elit agama sudah menjadi legitimator rezim kekuasaan, maka memberikan penghakiman atas sebuah komunitas maupun individu sebagai sebuah komunitas dan individu yang sesat tentu saja penuh dengan problematika sosial politik yang ada dibelakangnya. Bahkan lebih dari itu tatkala lembaga pemegang otoritas adalah sebuah lembaga yang berdiri di belakang negara yang tengah berada dalam kondisi carut-marut, tidak jelas kemana arah perubahan akan dibawa, kapan penyelesaian problem sosial (penyakit-penyakit) sosial akan selesai. Di sinilah sebetulnya MUI mengalami dua masalah besar, yakni problem otoritas dirinya sendiri dan problem otoritas negara, sehingga memutuskan suatu perkara akan mengundang banyak reaksi negatif.

Hal-hal yang menjadi dasar munculnya nabi baru seperti disinggung di atas, akhirnya akan membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa nabi baru sebenarnya bukan hal yang asing dalam tradisi keagamaan, termasuk dalam tradisi Islam, dan umumnya dalam tradisi Abrahamic Religions. Nabi-nabi baru akan senantiasa muncul tatkala kondisi sosial ekonomi, politik, otoritas dan budaya tidak jelas kapan akan ada penyelesaian. Selain itu, ketika terus terjadi debat yang tidak produktif tentang siapa minoritas dan siapa mayoritas, siapa berhak membuat fatwa dan difatwa, ini akan memberikan ruang yang memungkinkan munculnya komunitas baru dalam agama-agama dan di sana akan muncul apa yang disebut sebagai nabi baru. Nabi baru dalam maknanya yang tidak konvensional, seperti Nabi Muhammad, Isa, Ismail dan seterusnya.

---

<sup>11</sup> Khaled Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan*, (terj.) (Jakarta: Serambi, 2004), hal. 304-312.

Nabi baru bila boleh disebut adalah seorang pembaru, pemberontak atas status quo dan pemutlakan-pemutlakan atas suatu perkara dan dalil. Para Nabi baru ini yang merasa tidak nyaman dengan apa-apa yang dibakukan dan ditunggalkan (homogenisasi). Oleh sebab itu, tatkala kondisi bangsa tidak jelas, otoritas dipaksakan, penunggalan menjadi mainstream, dan seterusnya maka nabi baru sudah bisa dipastikan akan muncul untuk memimpin suatu komunitas yang berbeda dengan lazimnya orang beragama, sekalipun akhirnya harus dianggap sesat atau disesatkan. Tetapi apakah benar-benar sesat kita juga tidak bisa memastikan, apalagi jika dikaitkan dengan problem otoritas dan problem sosial yang muncul.

Dengan memposisikan nabi baru sebagai pembaru, perlawanan atas tradisi kemapanan dan status quo, sebenarnya tidak ada masalah secara sosial politik, maupun secara teologis apalagi secara sosiologis. Menjadi masalah tatkala konstruksi Nabi baru dilihat dalam perspektif tunggal yakni nabi dalam maknanya yang konvensional, yakni kenabian pasca Muhammad, Isa dan Ismail. Hal ini yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh elit agama, termasuk elit politik sehingga tidak dengan mudah memposisikan komunitas yang berbeda dengan mainstream dianggap atau bahkan difatwa sesat, sementara problem sosial, keagamaan, dan politik serta ekonomi tidak dengan segera diselesaikan. Tentu saja dengan menyatakan bahwa komunitas tertentu adalah sesat akan memudahkan institusi negara untuk menindak karena memang seakan-akan mendapatkan mandat untuk menertibkan.

Apakah semua kelompok yang tidak sama dengan mainstream sealau akan disesatkan, sehingga arus ditertibkan? Apakah makna penertiban adalah sama dengan peleburan atau penghilangan komunitas tersebut dalam sebuah komunitas tertentu? Bagaimana dengan komunitas-komunitas yang terdapat di pedalaman Indonesia yang oleh para antropolog dan sosiolog lazim disebut sebagai komunitas *indigeneous people*, dan menganut tradisi keagamaan yang oleh mainstream sebut dengan animisme-dinamisme adalah komunitas yang sesat? Tentu terdapat masalah yang serius di sana. Terkait dengan soal kriteria animisme dinamis-me yang dialamatkan kepada komunitas yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun eksis di masyarakat Indonesia. Bukankah pembuatan identitas animis-dinamis itu oleh mereka yang menganut tradisi agama Abraham, bahkan lebih sempit lagi adalah mereka yang menganut tradisi Islam yang lazim dengan terminologi agama bumi dan agama langit? Mengapa agama langit dianggap benar sementara agama bumi dianggap salah? Tidak sebaliknya, agama bumilah yang benar, sementara agama langitlah yang salah? Tentu membutuhkan diskusi serius.

Dalam konsepsi problem semacam itu dalam tulisan ini secara agak khusus akan memberikan perhatian pada komunitas seperti Ahmadiyah dan Al Qiyadah Islamiyah yang sampai ramai menjadi perdebatan dan perhatian publik terkait fatwa sesat dari MUI, yang ternyata berbuntut pada terjadinya kekerasan publik yang oleh MUI sendiri saya kira tidak dikehendaki tetapi MUI tampak sekali tidak mengantisipasinya, sebab efek fatwa yang dibuatnya.

### C. Fatwa yang Berbuntut Anarkhi Publik

Ahmadiyah dan al-Qiyadah adalah dua komunitas yang sangat ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Tetapi derita yang paling mengerikan adalah ditanggung Ahmadiyah, sebab Ahmadiyah sudah cukup lama eksis di negeri ini, sudah sejak tahun 1950-an dan memiliki dasar legitimasi jika Ahmadiyah resmi berdiri di Republik bersanding dengan pelbagai macam agama di negeri ini. Sekalipun tidak berarti para pengikut al-Qiyadah al-Islamiyah tidak mengalami derita sebagaimana Ahmadiyah di Indonesia.

Sejak di fatwa sesat oleh MUI, Ahmadiyah Indonesia bagai pesakitan yang tidak layak hidup di negeri ini. Bahkan, sumbangan positif Jamaah Ahmadiyah pun tidak dihitung, daripada fatwa MUI yang agak kurang antisipatif pada munculnya pelbagai tindak kekerasan terhadap komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) itu sendiri. Fatwa MUI oleh sebagian kaum muslimin dianggap sebagai fatwa yang “menghalalkan” tindak kekerasan pada Jamaah Ahmadiyah, sekalipun pihak MUI menyatakan tidak boleh terjadi kekerasan atas Ahmadiyah, namun bukti-bukti di lapangan seperti dialami Jamaah Ahmadiyah di Kayumanis Jawa Barat, Kampus Al-Mubarak di Parung Bogor, di Mataram, Nusa Tenggara Barat adalah sebuah ironi atas munculnya fatwa sesat MUI atas Jamaah Ahmadiyah Indonesia.<sup>12</sup>

Sesungguhnya jika sebuah institusi atau komunitas dianggap sesat sekurang-kurangnya ada beberapa problem yang menyelimuti. Pertama, perbedaan pendapat tentang sesat tidaknya sebuah komunitas yang dipahami oleh umat Islam itu sendiri. Di sini pun masih bisa diperdebatkan, siapakah yang sesungguhnya berhak memberikan hukuman sekaligus tuduhan bahwa suatu komunitas itu sesat ataukah lurus, merupakan pertanyaan yang sangat serius harus dikemukakan terlebih dahulu, kemudian apakah benar pemakaian istilah sesat untuk sebuah komunitas yang

---

<sup>12</sup> Ahmad Suaedy dkk., *Poltisasi Agama dan Konflik Komunal*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hal. 49-76.

berbeda dengan mainstream dalam ritual, keyakinan atas sesuatu yang dikultuskan, apakah tidak lebih baik dengan menyatakan perbedaan-perbedaan sehingga tetap boleh hidup tetapi saling menghargai dan seterusnya.

Kedua, apakah hal tersebut tidak akan bertabrakan dengan koridor yang dinamakan dengan diskriminasi negatif atas sebuah kelompok jika memang nyatanya memiliki pengikut, pemimpin, rujukan, dan ritual yang melanggengkan apa yang disebut syariat dalam tradisi agama-agama? Tentu saja hal ini merupakan problem yang tidak ringan buat MUI dan kelompok Islam yang acapkali tergesa-gesa dalam memberikan hukuman atas mereka yang dianggap sesat. Oleh sebab itu, sesungguhnya yang mesti dipikirkan adalah bagaimana agar diskriminasi struktural, diskriminasi kultural dan diskriminasi religius tidak terjadi di bumi pluralis ini, sekaligus antar sesama elemen sipil saling menghargai dan menghormati sehingga dapat menciptakan apa yang dinamakan dengan civil religion sebagai bukti adanya kebebasan sipil dan civic right yang dijunjung tinggi.

Ketiga, mungkinkah sebuah institusi keagamaan mampu menjadi pengayom atas semua kelompok komunitas dalam kehidupan yang serba instan, serba mekanik dan serba heterogen? Inilah sebenarnya bagian dari tugas berat institusi agama semacam MUI, daripada hanya sekedar memberikan fatwa yang akan berdampak pada terjadinya kekerasan publik sehingga antar sesama anggota masyarakat terjadi saling curiga, saling memusuhi dan saling balas dendam, bukan hanya dendam kultural tetapi sekaligus dendam politik. Hal ini sesungguhnya jauh lebih mengerikan ketimbang fenomena aliran-aliran yang disesatkan, sebab saling curiga, dendam, dan permusuhan akan membuat seseorang dengan mudah menjadi anarkis, sehingga hidup ini menjadi penuh tribalisme politik dan agama, sebab umat beragama tidak lagi beradab, tetapi uncivilized.

Di situlah penting menelusuri mengapa MUI tampak mudah memberikan "fatwa" atas suatu komunitas yang sudah eksis, tidak memberikan kritik atas institusi resmi yang selama ini menjadi "tameng" umat, atau mendaku dirinya sebagai "tameng akidah umat". Tentu saja problem serius ada pada MUI yang selama ini merasa dirinya adalah merepresentasikan umat Islam Indonesia, bahkan representasi Tuhan dan Nabi di muka bumi.

Terkait fatwa sesat pada Ahmadiyah misalnya, apakah MUI memiliki daya tawar yang kuat atas mereka yang dengan gampang melakukan tindak kekerasan pada para pengikut Jamaah Ahmadiyah Indonesia? Apakah MUI telah melakukan sosialisasi pada publik bahwa di Indonesia itu ada Jamaah Ahmadiyah dan Gerakan Ahmadiyah, ada komunitas yang tidak mainstream seperti Syiah, tarekat

Naqshabandiyah, Syatariyah, Bagdadiyah, sampai Wahidiyah? Lalu apakah MUI juga memberikan fatwa sesat pada Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ahlusunnah, sampai dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang munculnya secara terang-terangan baru ada setelah rezim otoriter Orde Baru tumbang? Inilah masalah yang menjadi perhatian publik tentang MUI.

MUI juga menghadapi problem riil dunia yang oleh Akbar S Ahmed sebut sebagai problem komodifikasi religius dengan pelbagai bentuknya, dari komersialisasi ritual melalui media cetak, komersialisasi melalui media elektornik, dan komersialisasi ritual melalui pelbagai macam infotainment baik sinetron, iklan, dan jenis-jenis tayangan yang bersumbu pada materialisasi spiritual.<sup>13</sup>

Materialisasi spiritual inilah yang sejatinya jauh lebih berbahaya sebab para penggagasnya bukan hanya sedang melakukan penipuan pada publik religius agar memiliki kedekatan emosional, tetapi sejatinya dalam rangka mengeruk keuntungan yang demikian hebat melalui jalur yang seakan-akan suci dan tidak membohongi publik. Hal yang sama juga, apakah MUI pernah membuat fatwa tentang tayangan-tayangan sinetron misteri-religi yang di Indonesia saat ini demikian marak, ketimbang Ahmadiyah yang jelas memberikan sumbangan pada proses pencerdasan masyarakat dengan mendirikan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah?

Jika kita telusuri jejak Ahmadiyah di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1950-an sebetulnya agak aneh tatkala negara sedang riuh rendah dengan kondisi ekonomi yang carut marut, pertarungan politik yang semakin gencar, dan perebutan kekuasaan demikian kental MUI sebagai institusi negara mengeluarkan fatwa sesat atas Ahmadiyah, mengapa tidak sejak awal-awal berdiri dahulu?

Jika tidak ada kehati-hatian, peristiwa tragis yang menimpa Ahmadiyah dan al-Qiyâdah al-Islâmiyah akan terus berulang. Sementara MUI tidak dapat mengontrol atas fatwa yang dikeluarkan sebelumnya sebab fatwa yang sudah dikeluarkan dalam tradisi hermeneutik dan analisis wacana adalah sebuah "bola liar" yang bisa ditafsirkan dengan banyak makna oleh si penerima fatwa, sehingga "fatwa" akan sangat independen, dan pemberi fatwa tidak dapat mengontrolnya lagi. Fatwa yang sudah keluar dari MUI adalah sebuah bola liar kebijakan yang akan menyebabkan banyak akibat, baik positif maupun negatif di tengah masyarakat penerima fatwa, dan ingatkah bahwa hal tersebut adalah blunder sejarah yang akan berdampak pada banyak hal kehidupan umat manusia.

---

<sup>13</sup> Akbar S Ahmed, *Islam and The Postmodernism*, (Toronto: MacMillan, 1998), hal. 73.

Soal sesat-menyesatkan pada dasarnya adalah masalah pemahaman yang berkembang di masyarakat secara beragam. Tidak ada keseragaman tentang Ahmadiyah sehingga sebagian menganggap sesat seperti MUI, sementara lainnya, yang memahami bahwa sesuatu jamaah harus dilindungi dan berhak hidup, apalagi jelas rujukan, pengikut, pimpinan, ritual dan lokasinya tidak ada yang disembunyikan maka dia sudah layak disebut sebagai sebuah agama. Lalu apa lagi yang dipersoalkan, demikian pula problem pemahaman yang berbeda dalam melihat suatu komunitas, termasuk komunitas Ahmadiyah dan al-Qiyādah al-Islāmiyah, juga komunitas Lia Eden (Salamullah), dan Yusman Roy yang melangsungkan pendidikan salat dwi bahasa.

#### D. Kegagalan Negara

Memperhatikan munculnya komunitas-komunitas Islam yang demikian banyak, baik yang disesatkan atau tidak disesatkan oleh MUI, sesungguhnya bisa dinyatakan bahwa itulah bentuk kegagalan negara dalam mengelola keragaman bangsa ini. Sebab, negara sudah terbiasa dengan hidup yang seragam, monolitik dan tidak ada protes.

Mengikuti tesis Ted Robert Guur dalam *Why Men Rebel*, bahwa sebuah kekuatan dalam masyarakat yang senantiasa dipinggirkan, dengan segala macam termasuk alasan politik stabilitas, kesenjangan ekonomi, peminggiran budaya dan sekaligus peminggiran akses, maka komunitas akan melancarkan protes sebagai bentuk perlawanan yang selama ini dipendam. Komunitas sipil akan melawan tatkala batas-batas kewajaran sudah tidak bisa ditolerir lagi. Inilah sebenarnya bibit dari adanya sebuah pembangkangan sipil yang akan marak dalam sebuah negara.<sup>14</sup>

Kita sudah mafhum jika Indonesia merupakan negara yang sangat pluralistik dari segi etnik, agama, dan kelas sosial. Oleh karena itu, tentu akan sangat banyak ragam tradisi keagamaan, tradisi suku dan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat sebagai sebuah kekayaan dari Indonesia. Namun, kekayaan pluralitas negara ini akan menjadi sebuah persoalan serius sebagai tantangan hidup berbangsa dan bernegara tatkala negara gagal mengelola pluralisme SARA sebagai kekuatan nasional.

Kegagalan negara dalam mengelola pluralisme akan mengakibatkan adanya politik penyatuan sekaligus politik penyatean, yakni pengkambinghitaman atas kelompok-komunitas tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan kehendak rezim politik. Negara merasa perlu melakukan penyatuan sekaligus penyatean karena memandang jika komunitas yang "berbeda" dengan negara tersebut dibesarkan

---

<sup>14</sup> Ted Robert Guur, *Why Men Rebel*, (Toronto: Mac Milan, 1992), hal. 56.



akan menjadi kekuatan yang membahayakan negara itu sendiri. Dengan kekhawatiran negara terhadap komunitas sipil tersebut maka yang dilakukan adalah penekanan (pengekangan) agar komunitas tersebut tidak bisa berkembang. Namun negara tidak menyadari bahwa suatu ketika sebuah kekuatan yang selalu ditekan akan melakukan perlawanan.

Munculnya komunitas-komunitas yang disesatkan oleh institusi negara (baca: MUI) dalam konteks gerakan sosial bisa disebut sebagai sebuah gerakan protes yang dilancarkan oleh komunitas keagamaan sebagai bagian dari komponen masyarakat sipil yang bergerak melakukan dominasi negara yang dalam perspektif masyarakat sipil telah bekerja dengan cara-cara yang tidak demokratis, alias otoritarian sebagai dasar menjalankan kekuasaan.

Gerakan-gerakan protes semacam itu sebenarnya bukan hanya tipikal Indonesia. Banyak gerakan keagamaan menjadi embrio dari gerakan protes yang terjadi di banyak negara, sehingga gerakan keagamaan disebut sebagai salah satu elemen masyarakat sipil yang paling berpengaruh, seperti gerakan keagamaan di Brazil, Ecuador dan Pilipina.<sup>15</sup>

Ahmadiyah adalah korban yang paling jelas dari kegagalan negara mengelola pluralitas bangsa di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya Ahmadiyah yang disesatkan oleh MUI, komunitas-komunitas yang dianggap (dituduh) menyebarkan paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme oleh MUI difatwa sesat dan haram. Dengan demikian sesungguhnya MUI menempatkan dirinya bukan hanya sebagai penjaga pintu sorga tetapi sekaligus sebagai penjaga status quo negara yang sampai saat ini menjadi pelindungnya karena status kelembagaan MUI merupakan lembaga negara yang secara sah dibolehkan mengeluarkan fatwa sesat dan haram atas komunitas yang dianggap berbeda.

Bukti-bukti kegagalan negara dalam mengelola pluralisme bukan saja terkait dengan komunitas berlatar belakang keagamaan (termasuk keislaman) tetapi sekaligus negara gagal dalam membuat kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Negara bahkan oleh sebagian besar elemen masyarakat sipil dinilai gagal dalam membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, sehingga jumlah rakyat yang miskin sampai saat ini sekalipun menurut Badan Pusat Statistik terjadi penurunan tajam dari tahun 2006 yang berjumlah 37 juta, menjadi 17.6 juta, sementara World Bank menyatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia sampai tahun 2007, meningkat menjadi 49,5 juta jiwa orang miskin.

---

<sup>15</sup> Lofland, *Protes*, terj. Roem Topatimasang, (Yogyakarta: Insits Press, 2004), hal. 203-225.

Bukti lain kegagalan negara dalam mengelola Republik ini adalah semakin rumitnya kehidupan sosial antarkelompok di beberapa provinsi Indonesia. Konflik sosial menjadi salah satu cermin betapa negara ini gagal mengelola negara, utamanya sejak rezim Orde Baru sampai tahun 2006, Indonesia selalu menjadi juara dunia dalam konflik sosial yang menyebabkan korban jiwa ribuan umat manusia. Bahkan, data UNDP (UNSFIR) menyatakan bahwa sampai tahun 2004 Indonesia adalah juara dunia dalam konflik etnik dan agama.

Korupsi adalah fenomena yang sangat mengerikan lainnya sehingga Indonesia, seperti dikemukakan Transparency International Indonesia (TII) sampai Desember 2007, Indonesia adalah juara Asia dalam korupsi, dan juara kelima tingkat dunia. Padahal, Majalah Forbes Asia Desember 2007 mengumumkan daftar orang-orang terkaya di Indonesia yang sebagian kecilnya adalah pejabat negara, dan sebagian besar adalah konglomerat yang bisa dikatakan dekat dengan kekuasaan. Di sana disebutkan Abu Rizal Bakrie adalah orang terkaya di Indonesia.

Dengan problem sosial yang demikian hebat tersebut, masyarakat akhirnya memberikan penilaian miring pada pemerintah, seperti dinyatakan oleh para pengamat politik, ekonomi dan keagamaan semacam Faisal Basri, Amien Rais, Abdurrahman Wahid bahkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, termasuk Sutrisno Bachir yang menyatakan negara gagal dalam membuat kebijakan yang pro kaum miskin, negara gagal dalam mendemokratiskan partai, negara gagal dalam mengelola pluralisme agama (komunitas agama) dan negara gagal dalam membangun hubungan legislatif-eksekutif selain gagal dalam membangun hubungan presiden dan wakil presiden.

## E. Kegagalan Dakwah

Selain kegagalan negara dalam mengelola negara secara maksimal sehingga banyak problem sosial muncul di tengah masyarakat, munculnya komunitas yang disesatkan oleh MUI sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai sebuah kegagalan institusi agama dalam hal pencerahan melalui dakwah agama (Islam) yang dilakukan selama ini. Saya khawatir gagalnya dakwah Islam karena sebagian besar dakwah yang diselenggarakan adalah dakwah yang bersifat indoktrinatif, bukan bersifat pencerahan pada umat sehingga umat menjadi semakin kritis dan berdaya, tetapi semakin "membabi buta" atas masalah yang dihadapi.

Dakwah Islam yang selama ini dikerjakan oleh komunitas Islam mainstream seperti Muhammadiyah, NU, Sarekat Islam, dan seterusnya tampaknya perlu

mendapatkan penyegaran kembali sehingga tidak membuat semakin kuatnya masyarakat hidup dalam segregasi politik yang cenderung memecah belah umat Islam sendiri. Segregasi politik Islam di Indonesia sendiri memang bila kita amati dengan cermat karena sebagian orang yang harusnya bergiat dalam wilayah dakwah malahan terjun habis-habisan dalam wilayah politik sehingga tidak bisa lagi membedakan mana yang menjadi bagiannya dalam dakwah dan mana yang menjadi bagiannya dalam politik.

Dalam dunia Islam Indonesia, terjadi apa yang disebut perselingkuhan antara politik kekuasaan dengan agama (Islam) sebagai agama mayoritas di Indonesia, sehingga orang Indonesia akan merasa aman tatkala sudah menempelkan atribut Islam dalam kehidupan politiknya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab gagalnya dakwah agama Islam di Indonesia. Dakwah Islam saling bersinggungan secara langsung dengan politik yang menyebabkan umat Islam tidak lagi dapat mempercayai mana "suara dakwah" dan "mana suara politisi" berkedok dakwah. Banyak tausiyah dilakukan oleh elit politik terutama elit politik Islam yang mengusung partai bersimbolkan Islam, sekalipun apa yang diperjuangkan seringkali tidak ada hubungannya dengan Islam apalagi umat Islam.

Kondisi seperti itu jelas saja membuat umat Islam limbung untuk memilih ulama sebagai sumber rujukan, sementara elit politik malah menjalankan gerakan dakwah yang sudah lazim dikerjakan oleh ormas Islam semacam Muhammadiyah dan NU. Sedangkan Muhammadiyah dan NU sendiri belakangan disibukkan dengan banyak agenda internal yang tidak kunjung selesai seperti manajemen organisasi terkait efektif dan efisiensi berorganisasi. Muhammadiyah dan NU bahkan semakin disibukkan oleh adanya gerakan politik berkedok.

Dalam perjalanan selanjutnya, jika dakwah Islam tetap seperti yang kita lihat sekarang maka yang akan terjadi dalam tubuh umat Islam adalah adanya sikap kurang percaya diri alias minderwadegh, sehingga akan dengan gampang memberikan tuduhan pada komunitas lain yang berbeda dengan dirinya sebagai komunitas yang sesat, atau komunitas yang perlu dipertobatkan dengan segera sebab telah melenceng dari ajaran yang "murni". Bahkan bukan hanya jiwa yang minder, tetapi sekaligus jiwa yang ingin mengundang permusuhan sebab senantiasa menganggap bahwa komunitas lain adalah musuh yang harus dihadapi setiap saat dengan segala cara. Umat Islam tidak lagi memiliki kedewasaan dalam berpikir, tidak memiliki ketenangan jiwa dalam menghadapi masalah yang muncul di depannya, dan seterusnya sehingga akan mudah mengambil tindakan sekalipun tindakan tersebut adalah gegabah,

namun akan dipikirkan setelah terjadi kerugian besar dalam masyarakat. Bukankah kita ketahui kerugian kerusakan Tasikmalaya tidak kurang dari 5 milyar rupiah akibat perusakan atas mereka yang Ahmadiyah oleh kelompok Islam yang merasa benar? Sifat saling curiga akan menjadi bagian dari cara hidup umat Islam yang berakibat tidak sehatnya umat Islam secara kejiwaan, sekalipun tampak sehat secara fisik.

## F. Penutup

Paparan di atas sebenarnya hendak mengatakan bahwa munculnya komunitas yang disesatkan bukan timbul dengan tiba-tiba, tetapi ada proses-proses yang mendahuluinya. Proses-proses tersebut bisa terkait dengan proses politik, ekonomi, maupun ekspresi keyakinan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, semestinya karena komunitas tersebut hadir dalam sebuah negara, maka negara pun harus mengoreksi dirinya sendiri dalam pelayanan terhadap seluruh warga negara, apakah dalam pelayanan sudah menempatkan setiap komunitas secara setara ataukah ada diskriminasi, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam bahasa yang lain dapat disebut dengan istilah apakah negara memberikan ruang publik yang setara antara satu komunitas dengan komunitas lainnya sehingga semua komunitas dapat berekspresi secara memadai tanpa ada rasa diskriminasi oleh rezim kekuasaan. Jika negara masih belum bisa memberikan ruang yang sama antara satu kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, sejatinya negara masih memberlakukan apa yang dinamakan politik diskriminatif yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam substansi demokrasi (*substancial democracy*) dan kebebasan publik.

Selain itu kita juga harus melihat bagaimana posisi kaum elit agama dalam memberikan pemahaman pada masyarakat luas. Apakah elit agama memberikan pemahaman dengan metode yang elegant; yakni memberikan banyak alternatif pada masyarakat sehingga masyarakat sendiri yang kemudian memilih, ataukah elit agama dalam berdakwah pada masyarakat bersifat satu arah, satu tafsir dan tidak memberikan ruang untuk dialog, debat atau perbedaan pandangan sehingga masyarakat agama (Islam) bersedia menerima apa yang disebut dengan multi tafsir agama, sebab sejatinya Tuhan adalah maha kuasa, maha bijaksana, maha pengampun dan maha adil, sehingga apapun perilaku manusia jika Tuhan menghendaki tentu akan terjadi. Oleh karena itu, apakah disesatkan ataukah diluruskan oleh institusi negara semuanya penilaian akhir terletak pada Tuhan. Manusia hanyalah memberikan tafsir atas kehendak dan firman Tuhan, kemutlakan kebenaran ada pada diri Tuhan sendiri.

Dengan pijakan semacam itu, tentu saja kita sebagai umat beragama (Islam) semestinya bisa bersifat arif bijaksana dan berpikir kritis atas hal-hala yang menurut kita meresahkan dan membuat bingung. Sebab belum tentu bingung itu adalah bagian dari kehidupan rakyat biasa yang cara beragamanya seringkali lebih arif bijaksana, lebih genuine ketimbang cara beragamanya kaum elit agama yang tidak jarang penuh dengan muatan politik kekuasaan. Keberagamaan kaum awam (rakyat) seringkali dimanipulasi oleh keagamaan elit yang bersifat simbolik dan kekuasaan, namun karena rakyat tidak memiliki kuasa maka rakyat selalu menjadi korban dari keagamaan elit. Sebab itulah, hemat saya umat Islam tidak boleh dengan mudah serta merta ikut-ikutan dalam praktek politisasi agama, termasuk aliran yang disesatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Akbar S. 1998. *Islam and The Postmodernism*. Toronto: MacMillan.
- B. Mc Guire, Meredith. 1981. *Religion: The Social Context*. California: Warsworth Publishing Company.
- Barker, Eileen. 1991. *New Religious Movement: A Practical Intrduction*. Portugal. HMSO Publishing.
- Basyir, W. Wahyu. 1998. *Konflik Sosial Sanggaledo*. Jakarta: Komnas HAM, Laporan Penelitian.
- Baum, Gregory. 1975. *Religion and Alienation: A Theological Reading of Sociology*. New York: Paulist Press.
- Durkheim, Emile. 1954. *The Elementary Form of the Religious Life*. New York.
- el-Fadl, Khaled Aboue. 2004. *Atas Nama Tuhan*, Jakarta. Serambi.
- Fakih, Mansour. 2004. *Jalan Lurus, Manifesto Cendekiawan Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist.
- Gurr, Ted Robert. 1992. *Why Men Rebel*. Toronto: Mac Milan.
- Lofland. 2004. *Protes*. Terj. Roem Topatimasang. Yogyakarta: Insist.
- Philpott, Simon. 2001. *Meruntuhkan Indonesi: Transisi Politik Indonesia*, Alih bahasa Uzair Fauzan. Yogyakarta: LkiS.

- Suaedy, Ahmad dkk. 2007. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Suaedy, Th. Sumartana dan Ahmad. 1997. *Kerusuhan Situbondo*. Jakarta: Laporan Penelitian, Interfidei.
- Taher, Tarmizi dkk. 1997. *Radikalisme Agama*. Jakarta: Litbang Depag.
- Wilson, Bryan R. 1973. *Magic and The Millenium: A Sociological Study of Religious Movement of Protest among Tribal and Third*. New York: World People, Harper & Row Publisher.